

**PAILIT SEBAGAI DASAR PEMBERHENTIAN
TIDAK HORMAT TERHADAP PROFESI
NOTARIS DALAM PRESPEKTIF UNDANG-
UNDANG JABATAN NOTARIS
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 20/PDT.SUS-
PKPU/2020/PN NIAGA SBY)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan**



Oleh:

Nama : Megawati

NIM : 217192004

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2022**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

JAKARTA

**TANDA PENGESAHAN
TESIS TELAH DIUJI**

Nama : **Megawati**

Nim : **217192004**

Judul:

**PAILIT SEBAGAI DASAR PEMBERHENTIAN TIDAK
HORMAT TERHADAP PROFESI NOTARIS DALAM
PRESPEKTIF UNDANG- UNDANG JABATAN NOTARIS**

**(STUDI KASUS PUTUSAN nomor 20/PDT.SUS-PKPU/2020/PN NIAGA
SBY)**

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji yang dibentuk oleh Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan dinyatakan **LULUS** dalam sidang ujian tanggal 25 Januari 2022, dengan Majelis Penguji terdiri atas:

1. Ketua Penguji : Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.

2. Anggota

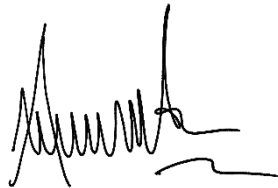
Penguji: a. Dr.

Gunardi, S.H.,M.H.

b.Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.

Jakarta, 26 Januari 2021

Pembimbing,



Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN TESIS UNTUK DIUJI

Nama Peserta : Megawati

N.I.M 217192004

Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN

JUDUL TESIS:

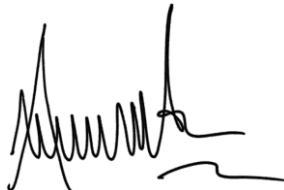
**PAILIT SEBAGAI DASAR PEMBERHENTIAN TIDAK HORMAT TERHADAP
PROFESI NOTARIS DALAM PRESPEKTIF UNDANG- UNDANG JABATAN
NOTARIS**

(STUDI KASUS PUTUSAN nomor 20/PDT.SUS-PKPU/2020/PN NIAGA SBY)

Secara substansi telah dinyatakan siap untuk diujikan Jakarta,

4 Januari 2022

Pembimbing Tesis,



(Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kata panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat diberi kemampuan melewati segala kendala yang muncul untuk menyelesaikan Tesis yang berjudul: “Pailit Sebagai Dasar Pemberhentian Tidak Hormat Terhadap Profesi Notaris Dalam Prespektif Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/Pn Niaga Sby)”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Magister Kenotariatan.

Dengan tersusunnya Tesis ini, Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing Penulis sehingga Tesis ini dapat selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan terutama kepada:

1. Prof. Dr. Agustinus Purna Irawan, S.T., M.T., selaku Rektor Universitas Tarumanagara;
2. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Prof. Dr. Mella Ismelina F. Rahayu, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum.
5. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing tesis yang tidak pernah lelah dalam membimbing, memberi pengetahuan, solusi permasalahan dan waktunya untuk penulis selama proses bimbingan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

6. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan selama saya mengikuti perkuliahan.
7. Kepada kedua orangtua penulis yang selama ini telah memberikan semangat, kasih sayang yang tidak putus-putus, bimbingan dan dorongan baik secara moral maupun materiil;
8. Kepada semua teman-teman seangkatan di Fakultas Hukum Magister Kenotariatan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaan di masa-masa perkuliahan yang telah memberikan semangat sehingga saya termotivasi menyelesaikan tesis ini;
9. Kepada bapak Hazlan Hezri selaku direktur di Perusahaan saya yang telah memberikan dukungan sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

Tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bentuk informasi untuk pengembangan Ilmu Hukum dan menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pembaca khususnya di kalangan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan masyarakat luas pada umumnya. Penulis sangat menyadari bahwa Tesis ini tidak luput dari kesalahan, oleh karena itu Penulis sangat membutuhkan kritik dan saran dari penguji dalam penyempurnaan Tesis ini.

Akhir kata, Penulis menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan-kesalahan di dalam Penulisan Tesis ini, baik dalam hal materi maupun dalam teknis Penulisan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang terkait dalam membantu pembuatan Tesis ini.

Jakarta, 30 Agustus 2021

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Konseptual	11
E. Kerangka Teoretis.....	15
F. Metode Penelitian	28
G. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum	
Kepailitan	
.....	
33	
1. Sejarah Peraturan Hukum	
Kepailitan	
.....	
33	
2. Sumber atau Dasar Hukum	
Kepailitan	

.....
37

3. Pengertian

Kepailitan

.....

43

B. Tinjauan Umum Mengenai Syarat Kepailitan	47
C. Pengaturan Prinsip Utang Dalam UU KPKPU	66
D. Tinjauan Notaris dan Kewenangannya.....	75
1. Sejarah Profesi Notaris di Indonesi	75
2. Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	80
3. Kewenangan Notaris.....	84
E. Pailit Dalam Jabatan Notaris	90
F. Kewajiban, Larangan dan Sanksi Bagi Notaris	93

BAB III: DATA HASIL PENELITIAN

A. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(PKPU)

.....

.....

107

B. Kasus Notaris Pailit dalam Permohonan
PKPU

.....

.....

118

1. Permohonan PKPU Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-
PKPU/2020/PN Niaga.

Sby

.....
.....

119

2. Permohonan PKPU Perkara Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/PB.Niaga

Sby

.....
.....

125

**BAB IV : ANALISIS PAILIT SEBAGAI DASAR PEMBERHENTIAN
TIDAK HORMAT TERHADAP PROFESI
NOTARIS**

.....
.....

136

- A. Penafsiran Tindakan Notaris Dinyatakan Pailit Dalam
Undang-Undang Jabatan
Notaris

.....
.....

136

- B. Implikasi Hukum Terhadap Pribadi yang Melekat Jabatan
Sebagai Profesi Notaris yang Dinyatakan Pailit Dalam
Perkara Putusan Nomor 20/PDT.Sus-PKPU/2020/PN
Niaga
SBY

.....
.....

152

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan

.....
.....

161

B. Saran

.....
.....

163

DAFTAR PUSTAKA 131

DAFTAR LAMPIRAN

ABSTRAK

Judul tesis : Pailit Sebagai Dasar Pemberhentian Tidak Hormat Terhadap Profesi Notaris Dalam Prespektif Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/Pn Niaga Sby)

Nama Mahasiswa : Megawati

Nim : 217192004

Kata Kunci : Notaris Pailit, Pemberhentian Tidak Hormat, UUJN

Isi Abstrak :

Secara pribadi seorang notaris dapat memiliki usaha lain di luar jabatannya seperti sebagai pengusaha karena dalam UUJN tidak aturan yang melarangnya, sehingga dalam dirinya melekat 2 (dua) subjek hukum yaitu sebagai pribadi dan profesi yang dalam keadaan tertentu bisa saja berkedudukan sebagai debitur yang dapat dipailitkan karena usahanya mengalami kebangkrutan dan adanya utang yang tidak dibayar. Kondisi ini seperti terjadi pada Devi Chrisnawati yang dinyatakan pailit setelah permohonan PKPU dikabulkan oleh pengadilan Niaga Surabaya sehingga Kanwil Kemenkumham dan MPW Jawa Timur telah melakukan langkah hukum untuk melaporkan Devi Chrisnawati diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai notaris karena telah dinyatakan pailit berdasarkan Pasal 12 huruf a UUJN. Timbul permasalahan bagaimana penafsiran tindakan notaris dinyatakan pailit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan bagaimana implikasi

hukum terhadap pribadi yang melekat jabatan sebagai profesi notaris yang dinyatakan pailit dalam perkara Putusan Nomor 20/PDT.Sus-PKPU/2020/PN Niaga SBY. Metode yang digunakan dengan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penafsiran norma hukum Pasal 9 Ayat (1) huruf a dan Pasal 12 huruf a UUJN lebih menekankan pada ketentuan sanksi dari notaris yang dinyatakan pailit bukan penyebab pailitnya notaris sehingga menimbulkan keaburan makna subyek hukum kepailitan antara pribadi dan profesi. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 UU KPKPU yang secara jelas menegaskan bahwa subjek kepailitan yaitu orang dan badan hukum. Implikasi hukum terhadap pribadi yang melekat jabatan sebagai profesi notaris yang dinyatakan pailit, maka akan kehilangan seluruh hak yang menjadi kewenangannya dan tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan pelayanan sesuai yang diatur dalam UUJN. Notaris kehilangan kecakapan dalam pembuatan akta otentik, perjanjian dan perbuatan-perbuatan hukum yang lainnya. Akibat hukum yang lain notaris yang direhabilitasi tidak dapat diangkat kembali oleh Kemenkumham karena belum ada mekanisme hukumnya.